

**ANALISIS KONFLIK SOSIAL YANG TERJADI PADA MASYARAKAT MUNA DI
KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA¹***Nasruddin Suyuti²**La Ode Aris³***ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan analisis terhadap konflik sosial yang terjadi pada masyarakat Muna di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik sosial dan penanganan konflik sosial tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data lapangan digunakan beberapa teknik yaitu teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Sementara sumber data adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada obyek penelitian atau secara langsung kepada masyarakat, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Muna Di Kecamatan Katobu disebabkan oleh beberapa hal, seperti: konflik kepentingan antara beberapa pihak, konsumsi minum-minuman keras, terjadinya kesalahpahaman antara pemuda, serta adanya aksi kekerasan yang direncanakan.

Kata kunci: konflik, sosial, masyarakat.

ABSTRACT

This study is an analysis of the social conflict which happens in Muna society at Katobu District of Muna Regency. The objective of this study was to determine the causes of social conflict and how to handle that social conflicts. This study used a qualitative approach. To get the data field was used several techniques that were observation, interviews, and documentation. The data sources used the primary and secondary data. Primary data is data obtained directly on the object of study or directly to the public, while secondary data is data obtained from documents or the results of studies that have been done by others. These results indicated that the social conflict in Muna society at Katobu caused by several things, such as: conflict of interest between several parties, alcohol consumption, the misunderstanding among youth, as well as acts of planned violence.

Keywords: konflik, sosial, masyarakat.

¹Hasil Penelitian

²Guru Besar Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: nasruddinsuyuti01@gmail.com

³Staf Pendidik pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: laodearis@yahoo.co.id

A. PENDAHULUAN

Konflik kepentingan yang melanda Sulawesi Tenggara telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Di antaranya terjadi di beberapa kabupaten/kota. Hal ini merupakan contoh memudarnya nilai-nilai moral. Konflik yang terjadi di Kabupaten Kolaka dan Kota Bau-bau adalah bentuk penolakan masyarakat atas operasi perusahaan di kawasan mereka meskipun pada dasarnya mereka dapat menorelansi operasi perusahaan tersebut sejauh izin yang diberikan tidak tumpang tindih dengan lahan yang menjadi hak kelola masyarakat (Suyuti, 2013).

Konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Muna yang melibatkan pemuda antar lorong menambah deret panjang konflik sosial di Sulawesi Tenggara. Konflik yang didalangi oleh pemuda antarlorong ini telah menghancurkan hubungan persahabatan, teman, terlebih lagi telah menghancurkan hubungan kekeluargaan. Konflik sosial tersebut berlangsung pada kurun waktu 2011 sampai 2012 dan meninggalkan korban harta, nyawa, serta sarana dan prasarana yang tidak sedikit. Tekanan psikologis pun masih membayangi warga di wilayah konflik sehingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan.

Namun kini belum diketahui secara pasti apa penyebab terjadinya konflik sosial pada masyarakat Muna tersebut. Memang, selama ini Kabupaten Muna dikenal dengan intensitas politik yang sangat tinggi tetapi konflik sosial dapat diminimalisir. Namun, mengapa konflik yang melibatkan pemuda antarlorong begitu mudah terpicu? Apa yang menyebabkan konflik itu terjadi? dan bagaimana cara untuk menanggulangnya agar tidak terjadi dimasa yang akan datang?

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik sosial pada masyarakat Muna di Kecamatan Kato-bu Kabupaten Muna dan bagaimana cara menanganinya.

Ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain teori konflik yang dikemukakan oleh (1) Miall (2000:7-8) bahwa konflik sebagai aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindari dalam proses perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang bertentangan dengan hambatan yang diwariskan; (2) Fisher (2001:4) konflik diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan; (3) Wahyudi (Taufiq, 2000:1) suatu sistem, pranata atau institusi yang mengalami konflik lebih disebabkan oleh adanya kecenderungan dari kebanyakan orang untuk memilih strategi hidup yang akomodatif daripada menempatkan dalam posisi yang saling kontradiktif; (4) Ritzer (2003), ketidakmerataan distribusi kekuasaan dan wewenang akan menempatkan masyarakat pada posisi yang berbeda yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Selanjutnya, konflik sosial yang terjadi di Indonesia belakangan ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek materialisme dan aspek post-materialisme. Dharmawan (2006:1), menyebutkan bahwa konflik materialisme adalah konflik sosial yang digerakkan oleh 'gerakan sosial klasik' (old social movement) yang sepenuhnya berorientasikan pada gugatan rasa keadilan materiil. Secara konkret, konflik sosial mewujudkan dalam bentuk tuntutan pemenuhan kebutuhan minimal pokok demi menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat, seperti redistribusi lahan bagi petani nontanah, tuntutan peningkatan upah minimum bagi buruh industri, peningkatan derajat kesehatan, pendidikan dan pelayanan umum lainnya bagi masyarakat miskin, dan sebagainya.

Sementara konflik post-materialisme adalah konflik sosial yang dimunculkan oleh ‘gerakan sosial baru’ (new social movement) yang berorientasi kekuatan pemenuhan kebutuhan akan pengakuan eksistensi ideologi baru atau sistem tata-kehidupan sosio-politik nasional. Ideologi seperti *democratism*, *ecologism*, *sustainability*, *good-governance*, *feminism* adalah contoh-contoh dari arus pemikiran baru yang menghendaki pengakuan tersebut. Konflik seperti ini dapat berupa demonstrasi masa yang menuntut agar negara secara konsisten menegakkan agenda demokrasi, desentralisme, penyelamatan lingkungan hidup, perang terhadap korupsi, perjuangan hak-hak perempuan, dan sebagainya.

Konflik sosial menurut Dharmawan (2006:2) bisa berlangsung pada arus antar ruang kekuasaan. Sementara menurut Bebbington (1997) dan Luckham (1998) terdapat tiga ruang kekuasaan yang dikenal dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan, yaitu ruang kekuasaan negara, masyarakat sipil atau kolektivitas-sosial, dan sektor swasta.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Katobu yakni wilayah Ibu Kota Kabupaten Muna yang sejak tahun 2011-2012 dilanda konflik yang banyak menelan korban baik korban jiwa, maupun harta benda. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dengan mengumpulkannya secara langsung di lokasi konflik dengan cara observasi, wawancara, serta penyebaran pedoman wawancara. Selain itu, data juga diperoleh dari data sekunder yakni dari dokumen-dokumen yang telah ada misalnya dari Biro Pusat Statistik, jurnal, buku, dan laporan. Sementara analisis data menggunakan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Terjadinya Konflik di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna

Konflik antar kelompok di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara telah merebakkan masyarakat di sekitarnya. Konflik ini telah berlangsung lama dan menimbulkan dendam berkepanjangan yang sewaktu-waktu dapat mencuat kembali apabila sengaja dipicu oleh oknum-oknum tertentu.

Konflik yang terjadi di Indonesia pada umumnya selalu ditumpangi oleh isu ‘sara’ yakni suku, agama, dan ras. Konflik tersebut dapat dilihat di Ambon, Sambas, dan Poso. Hal tersebut berbeda dengan konflik yang terjadi di Kabupaten Muna berdasarkan pada isu ‘komunitas’. Mereka yang bertikai tidak memperhatikan asal-usul ‘sara’ tetapi berdasarkan semangat komunitas, jadi walaupun yang bertikai merupakan pertalian keluarga dekat tetapi berasal dari komunitas yang berbeda tetap dianggap sebagai lawan.

Dalam literatur antropologi, komunitas adalah sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah berdasarkan ikatan kewilayahan (Koetjaraningrat 1985). Jika melihat tipe konflik yang terjadi di Kabupaten Muna, maka dapat dikatakan bahwa konflik tersebut adalah sentimen kewilayahan. Sebagai contoh, lorong empang yang dihuni oleh beberapa suku bangsa yaitu Muna sebagai warga mayoritas, Bugis, Makassar, Baruta, dan Buton, menyerang Palangga yang notabene suku bangsa juga beragam. Kedua komunitas tersebut telah berkonflik sejak lama.

Konflik antar komunitas ini berlangsung di wilayah ibu kota kabupaten yang dengan sendirinya wilayah tersebut merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian Kabupaten Muna. Adapun komunitas atau wilayah yang bertikai adalah Lorong Empang melawan Lorong Palangga, Lorong Rambutan bergabung dengan Jalan

S. Goldaria melawan Lorong Pendidikan, Jalan Kaendea yang dibantu dengan Jalan S. Goldaria dengan Rambutun melawan Jalan Sukowati yang dibantu oleh Lorong Pendidikan, Wapunto lawan Palangga, Jalan Dewi Sartika melawan Jalan Abdul Kudus, Jalan Lampogu melawan Jalan Wamponiki dan Waara melawan Banggai.

Dalam proses konflik selanjutnya Lorong Pendidikan yang bersekutu dengan Sukowati melawan hampir semua komunitas yang ada di wilayah perkotaan. Pengaruh Lorong Pendidikan dalam proses ini sangat besar karena hampir semua konflik komunitas terdapat campur tanggannya.

Konflik antar komunitas itu memuncak ketika Bupati Ridwan, BAE. turun dari jabatannya pada tahun 2011. Pada masa pemerintahannya, Ridwan, BAE. dapat mengakomodir berbagai kepentingan termasuk kepentingan ‘preman’ bahkan kelompok tersebut turut serta mempengaruhi berbagai kebijakan Bupati Muna.

Contoh kasus pelibatan preman pada masa pemerintahannya adalah ‘Kontu berdarah’. Sampai saat ini, kasus tersebut belum berhasil diselesaikan, padahal banyak menelan korban, baik harta benda, nyawa, dendam sosial, maupun tekanan psikologis warga.

Kekuasaan Ridwan, BAE. berakhir, diganti oleh bupati baru yakni dr. Baharuddin sebagai pemenang pilkada tahun 2011 yang diusung oleh gabungan partai termasuk di dalamnya Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini merupakan partai penguasa di Sulawesi Tenggara, mengalahkan Partai Golkar. Tentu saja, dengan adanya bupati baru maka sistem pemerintahan dan kebijakan berubah, sehingga berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan berubah.

Dalam pemerintahan dr. Baharuddin hampir semua pejabat yang ‘dekat’ dengan bupati sebelumnya dimutasi bahkan tidak diberikan jabatan, para pengusaha yang de-

kat dengan Ridwan tidak difungsikan dan menghapus pengaruh ‘preman’ dalam pemerintahan. Hal ini merupakan babak baru dalam kepemimpinan bupati terpilih yang mungkin terjadi tanpa memikirkan dampak negatif yang akan melanda daerah. Pejabat yang dimutasi tanpa alasan tentunya tidak menerima begitu saja, para pengusaha yang gulung tikar tidak hanya berpangku tangan dan penghapusan preman tanpa alasan juga tidak serta-merta menerima kebijakan ini, maka secara tersamar mereka semua itu membuat sebuah gerakan yang apik sehingga nampak setingan itu bukan merupakan datangnya dari mereka.

Hasil dari ‘setingan’ tersebut adalah Kabupaten Muna utamanya di wilayah perkotaan mencekam, yang mengakibatkan kondisi keamanan warga tidak terjamin, ditambah lagi ekonomi daerah hanya berjalan pada siang hari sementara pada malam hari bagaikan kota mati.

Hal ini dikuatkan lagi bahwa konflik di Kabupaten Muna merupakan setingan, karena biasanya jika dua komunitas mulai saling menyerang maka antarkomunitas di tempat lain juga saling menyerang. Untuk menghentikan semua pertikaian antar komunitas pihak kepolisian bekerjasama dengan TNI mengambil sikap tegas yaitu melakukan patroli pada malam hari dengan instruksi siapa saja yang berada di jalan raya pada malam hari yang memungkinkan itu dapat mengacaukan keamanan maka ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya. Dengan instruksi seperti ini akhirnya konflik di Kabupaten Muna untuk sementara dapat dikendalikan oleh pihak berwajib.

Ada beberapa penyebab terjadinya konflik sosial di Kabupaten Muna, yaitu sebagai berikut:

a) Meminum Minum Keras

Suatu kebiasaan pemuda dalam pergaulan hidup sehari-hari kadang-kadang tidak dapat membedakan mana yang berguna

bagi dirinya, sosialnya, lingkungannya, dan yang mana yang tidak baik. Sesuatu yang telah menjadi hukum alam bahwa apabila seseorang bergaul atau tinggal dalam lingkungan yang tidak baik maka seseorang itu kecenderungannya dalam pergaulan hidup sehari-hari meneruskan kepada hal-hal yang tidak baik, tetapi apabila seseorang bergaul atau hidup dalam lingkungan yang baik maka seseorang itu kecenderungannya akan baik.

Begitulah yang terjadi di Kabupaten Muna terutama para pemuda yang hidup dan bergaul di daerah konflik. Salah satu kebiasaan pemuda adalah meminum minuman keras sehingga dapat memicu permasalahan baru dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kegemaran anak muda dalam mengonsumsi minuman keras disebabkan oleh ajakan teman-teman, tidak adanya pekerjaan, dan terbatasnya keterampilan yang dimiliki.

b) Kesalahpahaman Antar pemuda Memicu Terjadinya Kekerasan Massal

Ketersinggungan antar pemuda dapat menyebabkan kesalahpahaman antara satu dengan yang lain. Kasus ini biasanya terjadi di tempat-tempat hiburan dan tempat keramaian lainnya. Kesalahpahaman akan memicu terjadinya konflik yang berujung pada penganiayaan dan kekerasan massal dan bentrok antar lorong.

2. Aksi Kekerasan yang Direncanakan

Kekerasan yang direncanakan sering terjadi kepada pihak-pihak yang bertikai. Aksi ini biasanya diawali saling menghubungi lewat *hand phone* (HP). Misalnya pemuda dari Wapunto menghubungi pemuda dari Palangga melalui SMS dengan kata-kata yang sifatnya menyepelkan atau menganggap remeh pemuda dari Palangga. Kata-kata tersebut sangat memancing, sehingga yang menerima SMS secara spontan menghubungi teman-temannya di Palangga untuk melakukan perlawanan kepada pe-

muda Wapunto karena mereka telah direndahkan. Aksi ini akan dilakukan secara terbuka agar terlihat jelas kelompok mana yang lebih hebat dari keduanya. Selain itu, ada juga kekerasan dengan cara mendatangi rumah yang diketahui bahwa di rumah tersebut terdapat musuh yang mereka cari.

Dalam kasus seperti di atas, biasanya terdapat mata-mata yang mengincar musuh. Misalnya kejadian di Desa Banggai, dalam sebuah rumah terdapat dua orang pemuda dari Palangga sedang meminum minuman keras, tiba-tiba didatangi oleh sekelompok pemuda dari Wapunto. Pemuda tersebut melontarkan kata-kata yang tidak sopan kepada pemuda Palangga sehingga menimbulkan ketersinggungan maka terjadilah perkelahian.

3. Intensitas Kejadian Konflik

Konflik antar komunitas yang melanda Kabupaten Muna antara tahun 2011 sampai 2013 meninggalkan duka yang mendalam. Konflik ini bukan saja memakan harta benda tetapi juga menelan korban jiwa. Selain itu, konflik ini menimbulkan trauma sehingga aktivitas masyarakat terganggu. Misalnya, roda perekonomian hanya berjalan pada siang hari, hubungan sosial tidak berjalan normal, dan hubungan antara keluarga satu dengan keluarga lain di lokasi yang bertikai tidak berjalan sebagaimana biasanya.

Konflik antar komunitas pada masa itu sering terjadi, karena pihak-pihak yang bertikai saling berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya Lorong Empang Kelurahan Raha 1 berbatasan langsung dengan Kelurahan Palangga sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk mendatangi lokasi tersebut. Selanjutnya, konflik Kelurahan Palangga dengan Kelurahan Wapunto. Kedua kelurahan ini juga berbatasan langsung sehingga sangat mudah untuk memobilisasi masa untuk melakukan perkelahian. Lokasi lain yang juga bertikai adalah Lorong Rambutan dengan Lorong Pen-

didikan (PK). Kedua lokasi ini berbatasan langsung bahkan untuk menghindari konflik ditengah jalan dibuat beton yang tingginya sekitar 3 meter.

Selama kurun waktu 2011 sampai 2012 kasus konflik yang ditangani oleh pihak kepolisian di Kabupaten Muna yaitu 97 kasus dan sampai bulan Agustus 2013 hanya terdapat satu konflik, sementara konflik lainnya tidak tercatat karena kasus-kasus tersebut tidak dilaporkan secara resmi pada pihak kepolisian.

Kasus lain yang memicu perkelahian adalah meminum minuman keras di pinggir jalan. Mereka yang melakukan kegiatan tersebut akan menahan siapa saja yang melintas di hadapan mereka untuk meminta uang sebagai tambahan pembeli minuman keras. Apabila tidak diberi, maka orang yang melintass tersebut akan dipukul atau ditusuk dengan pisau (*badik*) sehingga orang tersebut mengalami luka. Berawal dari kejadian seperti ini, si korban langsung melaporkan kepada keluarga atau temannya untuk melakukan aksi balas dendam.

Konflik antarkomunitas selanjutnya berkembang menjadi konflik menjadi gabungan antar komunitas. Dalam situasi ini maka mulai bermunculan manusia yang bertopeng. Biasanya mereka mengendarai sepeda motor antara lima sampai sepuluh sepeda motor yang menyusuri jalan utama Kota Raha. Dalam perjalanan tersebut, siapa saja yang mereka temukan akan langsung ditebas dengan parang sehingga masyarakat merasa takut untuk keluar rumah pada malam hari. Dari kasus-kasus tersebut, maka pada malam hari Kota Raha menjadi kota 'mati'.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa konflik yang menimpa masyarakat Muna khususnya di wilayah Kecamatan Katobu selama kurun waktu 2001-2013 telah merusak sendi-

sendi kehidupan sosial budaya di wilayah ini. Konflik ini telah mengakibatkan trauma masyarakat baik trauma fisiologi, psikologi, maupun sosial budaya.

Konflik yang telah berlangsung lama banyak menelan korban, baik korban harta maupun nyawa. Hal tersebut mengakibatkan trauma yang berkepanjangan di masyarakat.

Konflik ini berawal dari turunya bupati Muna Ridwan sebagai penguasa Muna pada saat itu dan digantikan oleh dr. Baharuddin. Dalam kebijakan bupati baru, tidak menguntungkan pihak atau bupati sebelumnya, sehingga mengakibatkan konflik kepentingan yang berakhir anarkis.

Dengan menggunakan kekuatan dan adu domba preman yang nota bene mereka tidak mendapatkan tempat yang layak di pemerintahan baru, maka keamanan akan kacau. Hasil dari semua itu adalah terjadi konflik antar pemuda yang melibatkan antar komunitas di wilayah perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bebbington, A. 1997. *Social Capital and Rural Intensification: Local Organizations and Islands of Sustainability in the Rural Andes*. *Geographic Journal*, Vol. 163/2, pp. 189-197.
- Dharmawan, A. H. 2006. *Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)*. Materi Seminar PERAGI Pontianak 10-11 Januari 2006.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, The British Council.

- Oberschall, A. 1978. Theories of Social Conflict. *Annual Review of Sociology* Vol. 4, pp. 291-315.
- Luckham, R. 1998. *Democratic Institutions and Politics in Context of Inequality, Poverty, and Conflict*. IDS Working Paper No. 104.
- Miall, H, Oliver Ramsbotham, & Tom Woodhouse. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Terj. Tri Budhi Satrio. Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern, Ed. Ke 6*. Jakarta: Prenada Media.
- Suwartapradja, O. S. 2005. *Konflik Sosial. Kasus Pada Pembangunan Bendungan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang Jawa Barat*. Makalah Disajikan pada SKIM IX UNPAD-UKM, 10 –12 Mei 2005. Bandung.
- Taufik, A Tuhana. 2000. *Konflik Maluku*. Yogyakarta: Gama Global Media.
- Vredenburg, J. 1978. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.

Aturan dan Perundang-Undangan

- UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.